

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN SITUASI KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Pada bab ini penulis akan mencoba memaparkan mengenai gambaran umum Perang Kongo Pertama (1996-1997) dan Perang Kongo Kedua (1998-2003) yang merupakan latar belakang dari rangkaian kejahatan kemanusiaan yang berkepanjangan yang sudah terjadi sejak Republik Demokratik Kongo (RDK) merdeka. Adapun kejahatan kemanusiaan yang terjadi di RDK adalah penggunaan anak-anak dibawah umur yang direkrut secara paksa untuk menjadi tentara anak, penculikan, pemerkosaan, kekerasan seksual, pembunuhan, penyerangan terhadap pemukiman penduduk dan juga penyerangan yang dilakukan di sekolah-sekolah di RDK.

A. Gambaran Umum Perang Kongo

1. Perang Kongo Pertama (1996-1997)

Republik Demokratik Kongo (RDK) merdeka pada tahun 1960 dimana pada saat itu RDK masih menggunakan nama Zaire. Sejak awal kemerdekaannya Zaire sudah mengalami konflik yang terjadi di dalam negeri antara pemimpin Zaire dengan kelompok pemberontak. Saat itu Zaire dipimpin oleh Joseph Mobutu dari tahun 1965 sampai tahun 1997. Tahun pertama kepemimpinannya, Mobutu

mengendalikan sistem pemerintahan Zaire melalui nepotisme dengan menunjuk orang-orang dari kalangannya untuk kepentingan pribadi. Orang-orang kepercayaan Mobutu ditempatkan pada posisi-posisi penting di Zaire dengan tujuan untuk dapat memudahkan Mobutu mengontrol seluruh struktur kekuasaan.¹

Mobutu banyak melakukan korupsi terhadap pendapatan Negara dan kleptorasi dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Kekayaan Mobutu diperkirakan dua kali lipat lebih banyak daripada hutang luar negeri Zaire pada saat itu. Mobutu bersikap tidak adil pada orang-orang kepercayaannya dengan pegawai negeri dan tentara nasional Zaire. Pegawai negeri Zaire tidak digaji dan disaat yang sama mereka diharapkan untuk dapat bertahan hidup atas kemampuannya sendiri. Begitupun dengan tentara nasional Zaire yang tidak digaji sehingga tentara nasional Zaire bertahan hidup dengan melakukan pencurian dan korupsi. Praktek suap dan korupsi menjadi sebuah *coping mechanism* atau sebuah hal yang biasa dilakukan demi memenuhi kebutuhan pegawai pemerintahan Zaire. Sangat bertolak belakang dimana saat itu Mobutu salah satu orang terkaya didunia dengan menggelapkan kekayaan Negara sebanyak 5 miliar dolar Amerika.²

Mobutu mulai kehilangan kendali atas kekuasaannya. Perekonomian Zaire menurun, kegiatan oposisi semakin meningkat. Situasi di dalam negeri mengalami kekacauan akibat rezim diktator Mobutu disusul terjadinya sebuah insiden

¹ Ch. Didier Gondola, *The History of Congo*, Greenwood Press, London, 2002, hlm 20.

² J. Tyler Dickovick, *The World Today Series 2013 Africa*, Stryker-Post Publications, Lanham, 2013, hlm 174.

terbunuhnya seorang pelajar dalam sebuah aksi demonstrasi di Lububamshi. Menanggapi situasi yang terjadi di Zaire, Amerika Serikat memotong dana bantuan untuk Zaire kecuali perlindungan kemanusiaan. Atas desakan internasional dan dalam negeri, Mobutu berjanji untuk melakukan reformasi dan memberlakukan sistem multi partai tetapi hal tersebut tidak pernah dipenuhi.³ Hal tersebut memicu aksi pemberontakan oleh tentara nasional yang membuat situasi di Zaire semakin kacau. Pemberontakan oleh tentara nasional, ekonomi yang melemah dan juga kekacauan internal secara otomatis membuat kekuatan pusat di Zaire melemah. Disaat yang sama sedang terjadi konflik di wilayah perbatasan Zaire Timur dengan Rwanda.

Konflik tersebut merupakan sebuah konflik etnis antara etnis Hutu dan Tutsi di wilayah Rwanda yang pada akhirnya menyeret Zaire kedalam konflik tersebut akibat lemahnya kekuatan dari pemerintah pusat. Konflik etnis suku Hutu-Tutsi merupakan sebuah konflik yang sudah lama terjadi di Rwanda. *Rwandan Patriotic Front* (RPF) yang didominasi oleh suku Tutsi melakukan penyerangan terhadap *Rwandan Armed Forces* (RAF) yang mayoritas bersuku Hutu begitupun sebaliknya.

Penyerangan yang dilakukan oleh kelompok RPF yang mayoritas bersuku Tutsi menyerang kelompok RAF yang bersuku Hutu dimenangkan oleh kelompok

³ J. Y. Smith, Congo Ex-Ruler Mobutu Dies, Washington Post, 8 September 1997, <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/africa/sep/08/mobutu.htm> diakses pada 29 Januari 2017 pukul 23.16 WIB.

RPF tetapi banyak warga suku Tutsi yang memilih untuk melarikan diri dari Rwanda dan membangun tempat-tempat pengungsian di wilayah timur Zaire dibawah bantuan kelompok pemberontak anti Mobutu. Mantan anggota RAF menjadikan wilayah Zaire sebagai pangkalan untuk melakukan penyerangan mendadak kepada Rwanda yang pada saat itu sejak tahun 1994 Rwanda dipimpin oleh Wakil Presiden Paul Kagame dan didominasi oleh suku Tutsi dari RPF.⁴ Kondisi dalam negeri yang kacau membuat Mobutu tidak dapat bertindak banyak untuk mengusir warga Tutsi-Rwanda yang tinggal di wilayah Zaire dan tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah timur Zaire tersebut.

Kelompok pemberontak Mobutu yang membantu pengungsi suku Tutsi-Rwanda bekerjasama membentuk sebuah kelompok aliansi bernama *Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo* (AFDL) yang dipimpin oleh Laurent Kabila untuk menggulingkan rezim Mobutu didukung oleh Rwanda, Uganda, Angola dan Burundi. Rwanda dan Uganda bergabung memberikan dukungan kepada Kabila untuk menggulingkan Mobutu dengan alasan Mobutu secara diam-diam mengizinkan pembentukan tempat-tempat pengungsian untuk mengganggu dan menyerang Negara-Negara di sekitar Zaire. Rwanda sangat ingin menggulingkan rezim Mobutu semenjak pengungsi Hutu dan kelompok milisi di Zaire berusaha untuk menyerang komunitas suku Tutsi di Zaire.⁵ Rwanda

⁴ *Congo Civil War/First Congo War 1996-1998*,
<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/congo-1.htm> diakses pada 1 Februari 2017
pukul 00.26 WIB

⁵ Ibid.

memberikan bantuan penyediaan senjata, tentara dan kebutuhan logistik pada kelompok pemberontak AFDL.

Sejak terbentuk AFDL menguasai tempat-tempat pengungsian dan melakukan penyebarluasan penyerangan secara sistematis ke tempat-tempat pengungsian di wilayah timur Zaire. AFDL menyebar pasukannya ke beberapa wilayah dan membunuh puluhan ribu pengungsi yang mencoba melarikan diri dari tempat-tempat pengungsian dan bersembunyi di rumah-rumah warga Zaire untuk kemudian dikubur secara masal dan mayatnya dihanyutkan di sungai Ruzizi atau dengan cara membakar rumah mereka secara langsung. 100 pengungsi Burundi dan Rwanda di dekat Luvungi dibunuh akibat mencoba melarikan diri dan kemudian mayatnya dikubur secara masal.

AFDL menyerang tempat pengungsian Kanganiro di Luvungi dengan persenjataan berat dan membunuh pengungsi dengan jumlah yang tidak terhitung. Dan di hari yang sama membunuh pengungsi yang bersembunyi di dalam rumah warga Zaire. 370 pengungsi di Luberizi dibunuh dan mayatnya dibuang ke tempat pembuangan kakus.⁶ AFDL membunuh 19 orang di Kidote di provinsi Kivu Selatan pada 6 Oktober 1996. AFDL dan tentara Rwanda menyerang Lamera, Minembwee dan Munyaka di Kivu Selatan pada tanggal 6-10 Oktober 1996 yang menyebabkan

⁶ Report of the Mapping Exercise documenting the most serious violations of human rights and international humanitarian law committed within the territory of the Democratic Republic of the Congo between March 1993 and June 2003, June 2010, http://www.whale.to/c/drc_un_report_final_june2010.pdf diakses pada 1 Februari 2017 pukul 18.16 WIB

lebih dari 150 orang meninggal. Selama perang ini setidaknya 200.000 orang terbunuh dan 250.000 orang terlantar selama konflik berlangsung.⁷

Pertarungan antara kelompok AFDL yang didukung oleh Rwanda, Uganda, Angola dan Burundi, melawan kelompok Mobutu yang didukung oleh mantan anggota RAF, Interhamwe (milisi etnis Hutu-Rwanda), dan *Zairian Armed Forces* (FAZ) mengakibatkan banyak warga sipil dan pengungsi di tempat-tempat pengungsian di wilayah timur Zaire terbunuh akibat tindakan kekerasan dan penembakan oleh kelompok-kelompok tersebut. Situasi dalam negeri yang kacau dan semakin melemahnya kekuatan persenjataan dari kelompok Mobutu untuk menghentikan kelompok pemberontak, Mobutu sepakat untuk mengakhiri kepemimpinannya selama 32 tahun dan melakukan transisi pemerintahan. Tetapi hal tersebut tidak terlaksanakan.

Berakhirnya Perang Kongo Pertama ditandai dengan meninggalnya Mobutu akibat penyakit yang dideritanya dan deklarasi oleh Laurent Kabila yang menyatakan bahwa Kabila menjadi Presiden Zaire serta mengubah nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo (RDK). Kepemimpinan Kabila diharapkan dapat menghentikan konflik antar etnis dan kelompok pemberontak juga memperbaiki struktur pemerintahan, sosial dan perekonomian di RDK.

⁷ Congo-Kinshasa/Zaire/Democratic Republic of Congo (1960-Present), <http://uca.edu/politicalscience/dadm-project/sub-saharan-africa-region/congo-kinshasazairedemocratic-republic-of-congo-1960-present/> diakses pada 1 Februari 2017 pukul 22.59 WIB

2. Perang Kongo Kedua (1998-2003)

Perang Kongo Kedua dimulai ketika Kabila dan aliansinya bersitegang akibat keputusan sepihak yang dikeluarkan oleh Kabila. Kabila memerintahkan pasukan Rwanda dan Uganda untuk meninggalkan wilayah RDK meskipun sebelumnya pasukan dari kedua Negara tersebut merupakan kawan dalam membantu Kabila untuk menggulingkan rezim Mobutu. Kabila juga mengganti staf-staf pemerintahan RDK yang berasal dari Rwanda dengan orang-orang dari RDK. Atas keputusan yang dikeluarkan oleh Kabila tersebut, Rwanda dan Uganda merasa tidak terima.

Menanggapi hal tersebut, Rwanda mulai merekrut etnis Banyamulenge untuk melakukan pemberontakan terhadap Kabila. Kelompok pemberontak ini kemudian diberi nama *Rassemblement Congolais pour la Democratie* (RCD) dan melakukan pemberontakan di wilayah Goma dengan persediaan senjata yang disediakan oleh Rwanda dan Uganda. Kabila juga membentuk kelompok baru yang diberi nama Mai-Mai yang dibantu oleh etnis Hutu di RDK dan melakukan penyerangan terhadap etnis Tutsi-Rwanda yang masih berada di wilayah RDK. Uganda sebagai kelompok lawan turut membentuk sebuah kelompok pemberontak anti-Kabila yang bernama *Mouvement pour la Liberation du Congo* (MLC) atau Kelompok Pembebasan Kongo.

Keterlibatan Negara-Negara lain di dalam Perang Kongo Kedua ini tidak lain karena faktor kepentingan yang mereka miliki selain untuk menumbangkan rezim Kabila. Kekayaan mineral yang terdapat di wilayah RDK merupakan salah satu faktor yang jelas menjadi tujuan utama keterlibatan Negara-Negara tersebut. Laporan PBB menyebutkan bahwa terdapat aktivitas eksploitasi mineral (emas, berlian dan coltan) secara ilegal yang dilakukan oleh Rwanda, Uganda dan Zimbabwe selama perang berlangsung.⁸ Keterlibatan Angola dalam membantu Kabila karena masih terdapat keberadaan kelompok UNITA yaitu kelompok pemberontak anti pemerintah Angola di wilayah RDK akibat bantuan yang diberikan oleh Mobutu pada perang sebelumnya.

Untuk mengakhiri konflik bersenjata antara dua kubu yang bersitegang, pada bulan Juli tahun 1999 diadakan sebuah perundingan untuk mengakhiri konflik bersenjata di Lusaka, Zambia yang dihadiri oleh enam Negara yaitu RDK, Zimbabwe, Angola, Namibia, Uganda dan Rwanda. Di dalam perundingan tersebut disepakati untuk melakukan gencatan senjata, hadirnya pasukan perdamaian UN dalam misi *United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUC), penarikan mundur pasukan asing, dan usulan untuk membentuk pemerintahan transisi untuk kemudian diadakan pemilihan umum. Tetapi Negara-Negara yang hadir dalam perundingan tersebut gagal untuk mengimplementasikan

⁸ Report of The Expert Panel on the Illegal Exploitation of Natural Resources an Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo, S/PRST/2000/20, <https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/0116report.pdf> diakses pada 3 Februari 2017 pukul 17.09 WIB

hasil perundingan tersebut. Laurent Kabila semakin mendapat tekanan internasional karena dianggap menghalangi misi pasukan perdamaian MONUC di RDK.⁹

Perang Kongo Kedua mulai mereda setelah terjadinya insiden penembakan terhadap Laurent Kabila pada 16 Januari 2001. Posisi pemimpin RDK kemudian digantikan oleh anak dari Laurent Kabila yaitu Joseph Kabila. Diperkirakan terdapat lebih dari empat juta orang meninggal selama perang berlangsung, kebanyakan karena kelaparan dan juga penyakit. Berakhirnya Perang Kongo Kedua ditandai dengan perundingan untuk membentuk sebuah perjanjian antara Pemerintah RDK dan Pemerintah Rwanda yaitu Perjanjian Pretoria.

Di dalam perjanjian yang dilakukan pada 30 Juli 2002, disebutkan bahwa, (1) RDK diharuskan untuk melakukan penangkapan dan pelucutan senjata kepada kelompok Interhamwe (milisi etnis Hutu-Rwanda) dan mantan anggota RAF, (2) RDK setuju untuk bekerjasama dengan MONUC, *Joint Military Commission* (JMC) dan pihak ketiga apapun yang lain dengan tujuan untuk menghentikan Interhamwe dan mantan anggota RAF dan (3) Pemerintah Rwanda setuju untuk melakukan penarikan tentara Rwanda dari wilayah RDK.¹⁰

⁹ Second Congo War (1998-2003), <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/congo-2.htm>, diakses pada 3 Februari 2017 pukul 17.45 WIB.

¹⁰ Special Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo, <https://monuc.unmissions.org/sites/default/files/n0258220.pdf>, diakses pada 3 Februari 2017 pukul 20.02 WIB.

B. Situasi Kejahatan Kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo

Berakhirnya Perang Kongo Pertama dan Perang Kongo Kedua masih menyisakan kasus kejahatan kemanusiaan yang diderita oleh warga RDK. Kejahatan Kemanusiaan menurut Statuta Roma Pasal 7 adalah beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya penyebarluasan atau penyerangan langsung yang ditujukan terhadap penduduk sipil yang dilakukan secara tersusun dan sistematis. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan tidak hanya ditimbulkan oleh kelompok pemberontak saja, tetapi turut serta tentara nasional RDK yang melakukan kekerasan seksual dan perkosaan terhadap warga sipil di RDK.

Beberapa bentuk kejahatan kemanusiaan yang terjadi di RDK seperti pembunuhan terhadap warga sipil dan anak-anak sebagai akibat dari perekrutan secara paksa terhadap anak-anak dibawah umur untuk dijadikan tentara pemberontak, perbudakan yang dilakukan kelompok bersenjata kepada warga sipil untuk mengikuti perintah pemimpin kelompok bersenjata, melakukan penyiksaan terhadap warga yang dianggap tidak sejalan dengan keinginan kelompok bersenjata, melakukan penganiayaan terhadap suatu kelompok yang didasarkan ras serta etnis, dan juga praktek perkosaan dan kekerasan seksual yang serta merta dilakukan kelompok bersenjata kepada perempuan dan anak-anak dibawah umur.

Joseph Kabila berusaha membawa RDK untuk sepenuhnya mengakhiri serangkaian konflik antar etnis di RDK dan berusaha menjadikan RDK sebagai

sebuah Negara yang demokratis dengan struktur sosial, perekonomian dan infrastruktur Negara yang lebih baik. Dalam usahanya untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, RDK mengadakan pemilihan Presiden untuk pertama kalinya pada tahun 2006 dan yang kedua pada tahun 2011 dimana keduanya dimenangkan oleh Joseph Kabila. Dalam pelaksanaan pemilihan Presiden tersebut tidak sedikit masyarakat dan partai oposisi yang mempertanyakan keabsahan dari hasil pemilihan tersebut.

Pada pemilihan tahun 2011 Tim Pengamat Pemilu Internasional yang berpusat di Amerika menyatakan ada bukti bahwa surat-surat suara dari hampir 2.000 tempat pemungutan suara di ibukota Kongo, Kinshasa, hilang. Dilaporkan juga di beberapa lokasi 99 sampai 100 persen pemilih yang memberikan suara yang sebagian besar dan hampir seluruh suara diberikan kepada Joseph Kabila.¹¹ Keinginan Joseph Kabila untuk mempersatukan bangsa terlihat tidak sejalan perbuatan yang dilakukan oleh tentara nasional RDK yang melakukan aksi penembakan kepada 24 orang aktivis oposisi dan masyarakat awam yang berkumpul di jalan untuk mencegah aksi protes setelah diumumkan hasil pemilihan Presiden tahun 2011.¹²

¹¹ Pengamat Internasional: Hasil Pemilu Kongo Tak Kredibel, <http://www.voaindonesia.com/a/pengamat-internasional-hasil-pemilu-kongo-tak-kredibel-135413313/101925.html> diakses pada 4 Februari 2017 pukul 20.17 WIB.

¹² Tentara Kongo Tewaskan 24 Orang Pasca Terpilihnya Kabila Sebagai Presiden, <http://www.voaindonesia.com/a/tentara-kongo-tewaskan-24-orang-pasca-terpilihnya-kabila-sebagai-presiden-136058593/102431.html>, diakses pada 4 Februari 2017 pukul 20.22 WIB.

Di tahun 2016, RDK seharusnya sudah melaksanakan pemilihan Presiden kembali. Namun terjadi penundaan pemilihan yang disetujui oleh Mahkamah Konstitusi di RDK dengan alasan Negara tidak memiliki cukup dana untuk mengadakan pemilihan umum. Konstitusi RDK mengatur bahwa Presiden hanya dapat menjabat maksimal dua periode. Namun, pemerintah ingin mengubah peraturan pemilu dan memerintahkan digelarnya sebuah sensus sebelum pelaksanaan pemilu.¹³ Perubahan tersebut diduga sebagai bagian dari usaha Joseph Kabila untuk melanjutkan pemerintahan sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Aturan baru ini menyebabkan protes dari sebagian besar rakyat RDK dan dari pendukung partai oposisi yang mulai kehilangan kepercayaan atas kredibilitas Joseph Kabila untuk membawa RDK menjadi sebuah Negara yang demokratis dan dianggap tidak mampu untuk menghentikan serangkaian konflik yang masih terjadi di wilayah RDK.

Adapun kasus kejahatan kemanusiaan lainnya yang masih terjadi di RDK diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tentara Anak (*Child Soldiers*)

Perekrutan anak-anak dibawah umur untuk bergabung dalam kelompok bersenjata di RDK merupakan sebuah hal yang seringkali terjadi. Anak-anak dilibatkan didalam konflik yang terjadi di RDK terutama di wilayah timur RDK

¹³ 42 Orang Tewas dalam Aksi Protes Reformasi Pemilu Kongo, <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/580627-42-orang-tewas-dalam-aksi-protas-reformasi-pemilu-kongo>, diakses pada 4 Februari 2017 pukul 21.00 WIB.

yang sejak awal memang sudah rawan konflik. Mereka dibunuh, menjadi korban kekerasan seksual dan penculikan serta harus kehilangan anggota tubuh oleh banyak pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut. Ratusan sekolah dan rumah sakit diserang dan digunakan sepihak untuk kepentingan militer.

Berakhirnya Perang Kongo Kedua, memberi dampak pada terbentuknya kelompok-kelompok pemberontak baru yang saling bermusuhan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya ataupun sebagai bagian dari ketidakpuasan terhadap pemimpin RDK. Yang memprihatinkan adalah keterlibatan anak-anak dibawah umur untuk turut serta dalam upaya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Kelompok *Union of Congolese Patriots* (UPC) yang dipimpin oleh Thomas Lubanga, dalam kurun waktu 1 September 2002 sampai 13 Agustus 2003 didakwa karena telah melakukan perekrutan secara paksa kepada anak-anak dibawah umur 15 tahun untuk menjadi tentara dan mengikuti pelatihan militer di Rwampara, Mandro dan Mongbwalu. Mereka dilatih dengan kekerasan dan menerima hukuman selama pelatihan.

Tentara anak-anak tersebut ditempatkan menyebar di beberapa wilayah seperti di Bunia, Tchomia, Kasenyi, Bogoro dan wilayah lainnya di RDK.¹⁴ Kelompok yang dipimpin Lubanga ini melatih ratusan anak-anak untuk membunuh, merampas dan memperkosa. Ratusan anak masih menderita dan sulit untuk

¹⁴ Alleged Crimes (non-exhaustive list), <https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga/pages/alleged-crimes.aspx>, diakses pada 5 Februari 2017 pukul 18.27 WIB.

melupakan apa yang mereka lakukan dan mereka lihat selama menjadi tentara anak.¹⁵

Pemerintah RDK pada tahun 2012 menandatangani sebuah *action plan* untuk menghentikan perekrutan anak secara paksa dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara nasional RDK, *Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo* (FARDC) dan menyerukan kampanye “*Children, Not Soldiers*” dan berjanji untuk sepenuhnya membebaskan anak-anak dari operasi militer pada tahun 2016.

Namun, dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2016 berjudul “*Children and Armed Conflict*”¹⁶, PBB melaporkan terdapat 2.549 aksi kekerasan terhadap anak-anak dan jumlah tersebut meningkat jauh dibandingkan laporan tahun 2014. Pelaku kekerasan ini mayoritas dilakukan oleh *Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo* (FARDC), melawan *Forces démocratiques de libération du Rwanda* (FDLR), *Allied Democratic Forces* (AFD), *Forces de résistance patriotiques en Ituri* (FRPI) dan beberapa kelompok bersenjata lainnya.

Perekrutan dilakukan kepada 488 anak dan 26 diantaranya adalah perempuan dimana 30% nya berusia dibawah 15 tahun. Dalam perekrutan tersebut, 89% dilakukan di North Kivu dengan jumlah masing-masing 219 tentara anak oleh

¹⁵ Hague Prosecutor says warlord used children to kill, <http://www.nation.co.ke/news/africa/1066-520146-view-asAMP-wikc9kz/index.html>, diakses pada 5 Februari 2017 pukul 18.36 WIB.

¹⁶ Children and Armed Conflict, Report of Secretary-General, 20 April 2016, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/348/12/PDF/N1234812.pdf?OpenElement> hlm 9-11, diakses pada 5 Februari 2017 pukul 00.50 WIB

FDLR, 89 tentara anak oleh Raia Mutomboki, 69 tentara anak oleh Nyatura dan 111 tentara anak oleh kelompok lainnya. Anak-anak tersebut dilibatkan dalam operasi militer dan bentrokan antara kelompok bersenjata yang terjadi di wilayah North Kivu dan Ituri.

Setidaknya 80 anak dibunuh dan 56 anak harus kehilangan anggota tubuhnya dalam perekrutan ini. Kelompok ADF, FRPI dan FDLR merupakan pelaku kejahatan utama dalam perekrutan anak-anak sebagai tentara anak. Pengadilan nasional RDK telah melakukan penangkapan kepada 20 pelaku kejahatan dari kelompok ADF, 19 pelaku dari FRPI dan 14 dari FDLR.

Sebagian besar anak-anak yang pernah terlibat sebagai tentara anak tidak dapat kembali kerumah mereka. Terdapat tiga alasan, yaitu, pertama, banyak orang yang terbunuh di dalam perang dan ada kemungkinan besar keluarga mereka ikut terbunuh dalam perang tersebut sehingga mereka tidak memiliki keluarga lagi. Kedua, beberapa keluarga tidak ingin untuk menerima anak-anaknya yang telah menjadi tentara untuk kembali ke rumah karena anak-anaknya pernah melakukan pembunuhan. Ketiga, keluarga dengan sengaja tidak menerima anak-anaknya kembali ke rumah untuk melindungi mereka dari tekanan atau siksaan dari komunitas mereka yang berpikiran bahwa anaknya berhak untuk disiksa akibat perbuatan yang dilakukannya selama menjadi tentara.¹⁷

¹⁷ Child Soldiers in DRC, <http://www.child-soldier.org/child-soldiers-in-drc> diakses pada 5 Februari 2017 pukul 01.29 WIB.

Hal yang lebih memprihatinkan adalah anak-anak tersebut setelah dipaksa untuk menjadi tentara, banyak dari mereka yang kemudian ditangkap dan ditahan. Pasukan keamanan RDK menahan dan menangkap ratusan anak yang diduga berasosiasi dengan kelompok bersenjata. Berdasarkan laporan PBB, *Congolese Armed Forces* menangkap dan menahan setidaknya 257 anak selama tahun 2013 sampai tahun 2014. 40 persen dari anak-anak yang diwawancarai oleh PBB mengatakan bahwa mereka diperlakukan dengan kekerasan selama penahannya. Mereka tidak mendapatkan akses untuk memiliki pengacara, memiliki sedikit akses untuk mendapatkan makanan, air bersih dan fasilitas kesehatan.¹⁸

2. Kekerasan Seksual dan Pemerksaan (*Sexual Violence and Rape*)

Sama halnya dengan penggunaan anak-anak sebagai tentara pemberontak, kasus kekerasan seksual dan pemerksaan terhadap wanita dan anak-anak dibawah umur merupakan hal yang lazim terjadi di RDK. Pemerksaan disusun secara sistematis dan teratur yang dilakukan sebagai bagian dari taktik perang oleh para tentara pemberontak untuk menekan keadaan psikologis lawannya dengan mempermalukan dan menjatuhkan moralnya.

Dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2016, dilaporkan sebanyak 254 anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh beberapa

¹⁸ Extreme Measures Abuses against Children Detained as National Security Threats, Human Rights Watch Report 2016, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/crd_detained0716web_1.pdf diakses pada 5 Februari 2017 pukul 21.27 WIB.

kelompok bersenjata di RDK. Kelompok bersenjata yang dianggap bertanggung jawab terhadap kekerasan seksual tersebut adalah FRPI sebanyak 67 orang, Raia Mutomboki sebanyak 33 orang dan Mayi-Mayi Simba sebanyak 27 orang.¹⁹ Kekerasan seksual tidak hanya datang dari kelompok pemberontak saja, tetapi kekerasan juga dilakukan oleh tentara nasional RDK. FARDC bertanggung jawab atas 68 kasus, Polisi Nasional Kongo atau *Congolese National Police* atas 19 kasus dan *National Intelligence Agency* atas 2 kasus. Terdapat total 42 anggota FARDC dan 11 anggota *Congolese National Police* ditangkap atas insiden tersebut.²⁰

Antara tahun 2012 sampai tahun 2013, pertempuran antara kelompok pemberontak M23, pasukan MONUSCO dan tentara pertahanan nasional menghancurkan situasi keamanan di wilayah timur RDK dan menyebabkan ribuan perempuan dan anak mengalami perkosaan dan kekerasan seksual. Sejak Januari 2010 sampai Desember 2013 UN *Joint Human Rights Office* (UNJHRO) mencatat sebanyak 3.636 kasus kekerasan seksual dilakukan oleh pasukan pemerintah dan kelompok pemberontak. Dan dalam bulan Januari sampai September 2014, MONUSCO mencatat terdapat 650 kasus kekerasan lainnya. Kekerasan seksual merupakan sebuah perhatian utama atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di RDK.²¹

¹⁹ Children and Armed Conflict, Report of Secretary-General, loc. cit.

²⁰ Ibid.,

²¹ Fearless Voices – Speaking Up For Peace, Equality and Justice in the Democratic Republic of the Congo, Report of Caritas Australia, <http://www.caritas.org.au/docs/campaigns/fearless-voices.pdf>, hlm 16, diakses pada 5 Februari 2017 pukul 21.48 WIB.

Ketidakstabilan, kemiskinan, konflik dan pengusiran membuat situasi atas kekerasan seksual tetap terjadi, tetapi, budaya impunitas telah membuat perkosaan tidak dapat dihindarkan dan menjadi sebuah realitas yang terus terulang oleh jutaan wanita dan anak-anak. Dibawah perhatian internasional dan bantuan dari MONUSCO, gereja dan organisasi NGO, pemerintah RDK telah membuat beberapa kemajuan untuk menghentikan impunitas bagi pelaku kekerasan seksual. Tetapi di tahun 2014, kebanyakan dari kasus perkosaan dan kekerasan seksual tidak pernah diinvestigasi dan para pelaku kejahatan tidak dijatuhkan hukuman.²²

Impunitas merupakan hal yang biasa dilakukan di RDK dan hal tersebut juga merupakan kekurangan dari hukum nasional RDK. Banyak dari pelaku kejahatan seksual dan perkosaan terbebas dari tuntutan akibat adanya impunitas di dalam hukum nasional RDK. Hukum nasional RDK tidak cukup mampu untuk mengurangi toleransi dari kekerasan seksual dan impunitas dalam berbagai konteks. RDK tidak memiliki hukum terhadap kejahatan seksual sebagai tindakan kriminal, RDK tidak memiliki hukum untuk memfasilitasi keluarga yang ingin menyelesaikan perkara secara damai dengan para pelaku kejahatan seksual, RDK tidak memiliki definisi yang jelas dari perkosaan di dalam *Military Criminal Code*, dan tidak ada kode kriminal mengenai ketentuan perkosaan sebagai kejahatan perang. Dalam upayanya menghentikan kekerasan seksual dan perkosaan, pemerintah RDK melakukan beberapa hal. Diantaranya pada September 2013, RDK menetapkan sebuah lembaga legislasi untuk membentuk *National Human*

²² Ibid., hlm 23.

Rights Commission atau Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia. Pada Maret 2013, ketua dari CNDP dan ketua dari M23 berada dibawah pengawasan ICC. Di akhir tahun 2013, dikeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 39 pasukan FARDC dan 13 anggota M23.²³

3. Penculikan, Penyerangan Warga Sipil dan Penyerangan Sekolah (*Abductions, Civilian Attacks and School Attacks*)

Penculikan terhadap anak-anak di RDK dilakukan oleh kelompok bersenjata dengan tujuan untuk menjadikan anak-anak tersebut sebagai tentara, diperkosa ataupun dijadikan sebagai budak. Dalam laporan PBB tahun 2016, disebutkan bahwa terdapat 195 laporan mengenai penculikan dimana 68 kasus diantaranya dilakukan oleh kelompok Raia Mutomboki, FRPI dan ADF. Anak-anak perempuan dilaporkan diperkosa dan sekitar 40 persen dari anak-anak tersebut dinyatakan masih hilang. Kelompok *Lord Resistance Army* (LRA) selama tahun 2015 dilaporkan masih melakukan penculikan terhadap anak-anak.²⁴

Penyerangan ke sekolah-sekolah untuk kepentingan militer oleh kelompok-kelompok tersebut meningkat sejak awal tahun 2012 dimana saat itu *Congolese Army* menyerukan kampanye militer untuk melawan kelompok pemberontak M23 di wilayah Kongo Timur. Perang selama 19 bulan berakhir pada bulan November tahun 2013 setelah *Congolese Army* berhasil melawan kelompok pemberontak

²³ Ibid.,

²⁴ Children and Armed Conflict, Report of Secretary-General, loc. cit.

M23. Sejak tahun 2013 Kementerian Pertahan RDK sudah mengeluarkan aturan pelarangan penggunaan sekolah dalam praktek militer tetapi 20 sekolah digunakan oleh FARDC, 13 sekolah dikosongkan dan 10 sekolah digunakan oleh kelompok bersenjata lainnya.²⁵

Penculikan seringkali dilakukan ketika anak-anak sedang dalam perjalanan ke sekolah atau ketika kelompok bersenjata tersebut mendatangi sekolah mereka dan mengambil anak-anak tersebut secara paksa untuk kemudian ikut ke dalam kelompok bersenjata tersebut. Kelompok bersenjata dan tentara nasional menjadikan sekolah sebagai sasaran untuk keperluan militer. Ruangan-ruangan sekolah diubah sebagai basis militer, asrama tentara, tempat pelatihan dan tempat penyimpanan senjata dan amunisi. Kelompok bersenjata membakar fasilitas bangunan sekolah yang terbuat dari kayu termasuk buku, meja dan kursi untuk dijadikan bahan bakar. Seringkali anak-anak memilih untuk tidak berangkat sekolah untuk menghindari penculikan dan dibawa oleh tentara pemberontak untuk menjadi bagian dari kelompok mereka.²⁶

Penyerangan juga dilakukan terhadap warga sipil dan pemukiman penduduk. Serangan yang dilakukan secara brutal kepada penduduk banyak dilakukan di wilayah Kongo Timur termasuk diantaranya North Kivu, South Kivu, Katangan dan provinsi Orientale. Pada September dan October 2013, kelompok

²⁵ Children and Armed Conflict, Report of Secretary-General, loc. cit.

²⁶ DR Congo: Student, Schools at Risks in Conflict Zones, <https://www.hrw.org/news/2015/10/27/dr-congo-students-schools-risk-conflict-zones> , diakses pada 6 Februari 2017 pukul 01.54 WIB.

Sheka menculik setidaknya 20 anak sekolah, dan menggiring mereka kedalam hutan untuk kemudian dibunuh bagi mereka yang terlalu lemah dan kelelahan. Di akhir 2013, anggota Raia Mutomboki menembak dan membunuh dengan parang kepada 21 penduduk suku Hutu di Masisi, North Kivu.²⁷

Selain di wilayah North Kivu dan South Kivu, penyerangan terhadap warga sipil juga terjadi di wilayah Beni. Setidaknya pasukan bersenjata telah membunuh 680 warga sipil dan 120 penyerangan di wilayah Beni sejak bulan Oktober tahun 2014.²⁸ Kelompok bersenjata menyerang penduduk di wilayah Beni dengan menggunakan parang dan kapak. Terdapat dugaan bahwa motif penyerangan tersebut adalah untuk memporak-porandakan kedamaian yang telah dibangun selama 2 tahun belakangan dan bermaksud untuk menghasut penduduk untuk bangkit dan melawan pemerintah.²⁹

Aksi kekerasan dan kekejaman sudah begitu melekat terutama di wilayah North Kivu dan South Kivu RDK dimana kelompok bersenjata secara sistematis menargetkan penduduk sipil. Pertikaian etnis merupakan perhatian utama di RDK yang sudah berlangsung sejak 15 tahun terakhir yang secara fundamental mengakar

²⁷ World Report 2015: Democratic Republic of Congo, <https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/democratic-republic-congo>, diakses pada 6 Februari 2017 pukul 13.39 WIB.

²⁸ DR Congo: Protect Civilians in Beni From Attack, <https://www.hrw.org/news/2016/10/07/dr-congo-protect-civilians-beni-attack>, diakses pada 6 Februari 2017 pukul 13.49 WIB.

²⁹ Serangan Teror Kapak dan Parang di Kongo, 36 Warga Tewas, <http://global.liputan6.com/read/2577130/serangan-teror-kapak-dan-parang-di-kongo-36-warga-tewas> diakses pada 6 Februari 2017 pukul 13.54 WIB.

untuk saling berkompetisi untuk menguasai lahan dan kekayaan alam yang terdapat di wilayah tersebut.³⁰

Tabel Kejahatan Kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo

Bentuk Kejahatan Kemanusiaan	Pelaku Kejahatan Kemanusiaan	Alasan/Tujuan Kejahatan Kemanusiaan Dilakukan
Tentara Anak (Child Soldiers)	Kelompok FDLR, Raia Mutomboki, Nyatura, FARDC, AFD, FRPI.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perekrutan secara paksa dan kemudian dilatih untuk membunuh, merampas dan memperkosa juga dijadikan budak oleh pemimpin anggota. - Untuk dilibatkan dalam operasi militer.
Kekerasan Seksual dan Pemerkosaan (Sexual Violence and Rape)	Kelompok FRPI, Raia Mutomboki, Mayi-Mayi Simba dan FARDC.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerkosaan disusun secara sistematis dan teratur sebagai bagian dari taktik perang untuk menekan keadaan psikologis dengan memermalukan dan menjatuhkan moral. - Hukum nasional RDK tidak cukup mampu untuk mengurangi toleransi dari kekerasan seksual dan impunitas dalam berbagai konteks. - RDK tidak memiliki hukum terhadap kejahatan seksual sebagai tindakan kriminal.
Penculikan, Penyerangan Warga Sipil dan Penyerangan Sekolah (Abductions, Civilian Attacks, School Attacks)	Raia Mutomboki, FRPI, ADF, LRA, FARDC.	<ul style="list-style-type: none"> - Penculikan bertujuan untuk menjadikan anak-anak sebagai tentara anak, diperkosa ataupun dijadikan budak. - Menjadikan sekolah sebagai basis militer, asrama tentara, tempat penyimpanan senjata. - Penyerangan pemukiman penduduk diduga untuk mengacaukan kedamaian dan menghasut untuk melawan pemerintah.

³⁰ UN report finds evidence of arbitrary killings in eastern DR Congo, prompts calls for action, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43497#.WJgPmFV9601>, diakses pada 6 Februari 2017 pukul 14.07 WIB.

